



# Pengembangan Desa Wisata Berjo Menuju SDGs Desa Mandiri dan Berkelanjutan

Bayu Pranoto<sup>1\*</sup>, Trisni Utami<sup>1</sup>, Yuyun Sunesti<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 04, 2023

Revised July 26, 2023

Accepted August 24, 2023

Available online August 31, 2023

### Kata Kunci:

SDGs; Desa Wisata; Desa Mandiri; Pembangunan Berkelanjutan; Desa Berjo

### Keywords:

SDGs, Tourism Village; Independent Village; Sustainable Development; Berjo Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

masyarakat, ternyata juga menjadi peluang terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan desa dan pengelola wisata. Aspek keberlanjutan wisata Desa Berjo telah mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Program penghijauan, pemeliharaan lingkungan wisata dan manajemen pengelolaan sampah telah dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan.

## ABSTRACT

*Over the last few decades, tourism has become the fastest-growing industrial sector. In 2019, tourist visits around the world reached 1.5 billion tourists. Rural tourism as an alternative tourism is expected to provide various benefits for the village community. Berjo Village, a tourist village in Karanganyar Regency, has a significant development that hundreds of thousands of tourists visit yearly. This study aims to discover and explain how the development of the Berjo Tourism Village is towards realizing the SDGs of an independent village and its sustainability aspects. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data was collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were analyzed using the structuration theory framework of Anthony Giddens and John Elkington's triple bottom line. The results of this study indicate that the structuration agent is still at the stage of significance and dominance because Berjo Village is still a developing village with an IDM value of 0.6986. The amount of tourism revenue that should be able to provide various benefits for the community is an opportunity for acts of corruption carried out by village stakeholders and tourism managers. The sustainability aspect of Berjo Village tourism has encouraged the community to participate in the development and management of tourism so that it can improve the community's economy and reduce unemployment. Reforestation programs, maintenance of the tourism environment, and waste management have been carried out to maintain environmental quality.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [hayupranoto7@gmail.com](mailto:hayupranoto7@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

SDGs sebagai agenda pembangunan global merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang disepakati secara internasional yang di dalamnya terdapat 17 tujuan yang dijalankan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang dapat menikmati kedamaian dan kemakmuran, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, SDGs memiliki tiga pilar utama yaitu pembangunan manusia, sosial ekonomi, dan lingkungan (KC, Dhungana, & Dangi, 2021; UNDP, 2022).

Sebelum pandemi COVID-19, pariwisata selama beberapa dekade telah menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat. Pada tahun 1950 jumlah kedatangan turis internasional hanya berjumlah 25 juta wisatawan, meningkat menjadi 674 juta pada tahun 2000 dan menjadi 1,5 miliar pada tahun 2019. Lebih lanjut, pada tahun 2019 pariwisata menyumbang sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan satu dari sepuluh pekerjaan di dunia juga berhubungan langsung dengan sektor pariwisata (BMZ, 2022). Sejak disepakatinya agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) global pada tahun 2015, sektor pariwisata diharapkan dapat dan harus memainkan peran penting dalam memberikan solusi berkelanjutan bagi manusia, planet, kemakmuran, dan perdamaian. Pariwisata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung untuk semua tujuan pembangunan berkelanjutan (UNWTO, 2019).

Salah satu upaya penyelenggaraan alternatif pariwisata adalah dengan menampilkan suatu pedesaan yang sedemikian rupa menjadi desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, serta kebutuhan wisata lainnya (Ayuningsih, Pridia, & Teviningrum, 2019).

Pedesaan mempunyai lingkup kecil dan bersifat tradisional, tumbuh secara organik dan lambat, serta dikelola oleh masyarakat setempat. Sumber daya alam dan budaya lokal desa dilestarikan dan ditetapkan menjadi sebuah nilai dan masyarakat lokal mendapat manfaat dari pariwisata yang dijalankan (Kastenholz, Eusébio, & Carneiro, 2018). Penyelenggaraan wisata pedesaan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Empat alasan utama untuk menerapkan sistem pengelolaan berkelanjutan adalah untuk melestarikan kawasan sensitif, menyeimbangkan antara tuntutan konservasi dan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, dan melestarikan kearifan lokal dari daerah pedesaan (Ghaderi & Henderson, 2012).

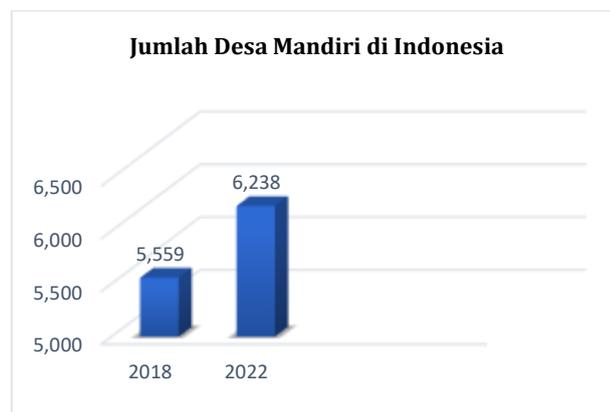
Wisata pedesaan yang dijalankan di beberapa desa di belahan dunia telah dapat berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Seperti wisata pedesaan di distrik Debarq dan Meket, Ethiopia yang dapat membantu mewujudkan SDGs 12, yaitu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan masyarakat yang juga dibantu dari sektor pertanian (Degarege & Lovelock, 2021). Kegiatan wisata pedesaan berbasis *homestay* di kawasan lindung nasional Phou Kao Khouay di Laos juga dapat memberikan dukungan dalam mewujudkan SDGs 1 tanpa kemiskinan dan ikut berkontribusi dalam pencapaian SDGs 3 mengenai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Pasanchay & Schott, 2021).

Kemunculan desa wisata di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dari jumlah desa sebanyak 83.820, Indonesia telah memiliki desa wisata sebanyak 1.734. Jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan karena pada tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa di Indonesia telah terdapat 3.419 desa wisata (Luthfi, 2021; Risanti, 2023). Sedangkan menurut data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2022 di Kabupaten Karanganyar telah terdapat 24 desa wisata (Ludiyanto, 2022). Yang sebelumnya pada tahun 2018 menurut data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharaga Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar baru memiliki 18 objek wisata/desa wisata (Jatengprov, 2018).



**Gambar 1.** Jumlah Desa Wisata di Indonesia (BPS, 2022)

Terwujudnya pedesaan menjadi sebuah desa wisata diharapkan akan terwujud kemandirian bagi desa itu sendiri. Sebab pada dasarnya pengelolaan desa wisata dititik beratkan pada peran dan manfaat bagi masyarakat setempat. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, desa mandiri di Indonesia berjumlah 5.559 desa yang sebelumnya baru berjumlah 2.894 desa di tahun 2014 (BPS, 2018). Sedangkan menurut data dari Kementerian Desa, pada tahun 2022 jumlah desa mandiri di Indonesia telah meningkat menjadi 6.238 desa (Sadya, 2022). Desa mandiri dapat dikategorikan sebagai desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang mudah, pelayanan umum yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 (BPS, 2018).



**Gambar 2.** Jumlah Desa Mandiri di Indonesia (BPS, 2022)

Terwujudnya kemandirian desa akan membantu terealisasikannya pembangunan dalam program SDGs Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya sumber daya dan potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs. Pengutamakan pembangunan desa dapat berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga SDGs Desa menjadi sangat penting dan mendesak (Iskandar, 2020). Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan yang cenderung lebih mengutamakan pembangunan di wilayah perkotaan. Selain itu, dengan memberikan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, diharapkan akan menjadi sebuah solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa (Prastiwi et al., 2019).

Salah satu desa wisata yang terus dikembangkan di Indonesia adalah Desa Wisata Berjo. Desa Berjo merupakan salah satu kawasan desa wisata yang berada di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang memiliki beberapa objek wisata, seperti Air Terjun Jumog, Candi Suku, Taman Hutan Rakyat, Tenggir Park, Sendang Lawu dan Telaga Madirda. Jumlah total wisatwan yang berkunjung ke objek-objek wisata tersebut dapat mencapai 90.000 orang dalam kurun waktu satu bulan yang implikasinya membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Berjo dapat mencapai 8 miliar dalam setahun. Jumlah kunjungan dan besaran PAD tersebut dapat dicapai pada tahun sebelum pandemi Covid-19 dan setelah

pandemi Covid-19 berangsur-angsur hilang atau pada tahun 2022. Dari enam objek wisata tersebut, hanya objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes Desa Berjo sehingga pendapatan yang diperoleh oleh BUMDes berkisar antara 2 – 4 miliar rupiah dalam setahun, yang kemudian hasilnya dibagi dengan pemerintah desa dan Dinas Pariwisata (Suhamdani, 2021).

Besarnya pendapatan dari sektor wisata akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat karena pemerintah Desa Berjo mempunyai program memberikan bantuan untuk setiap RT sebesar 10 juta rupiah, memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, dan memberi bantuan tali asih sebesar 1 juta rupiah kepada setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Pengalokasian dana untuk perbaikan infrastruktur desa juga menjadi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Berjo. Lebih lanjut, pemerintah desa juga sedang menggarap program pengolahan sampah wisata untuk kebersihan lingkungan dan gas warga, serta proyek PLTA yang akan memanfaatkan air dari Telaga Madirda. Bahkan rencana saat ini pemerintah desa akan memberikan bantuan biaya kuliah kepada pelajar yang berprestasi dan kurang mampu dari Desa Berjo yang nantinya diharapkan dapat ikut andil dalam memajukan desa (Suhamdani, 2021).

Penelitian mengenai wisata sebagai sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun belum terdapat kajian yang berfokus pada pemanfaatan wisata pedesaan sebagai sarana untuk mewujudkan SDGs desa mandiri dan aspek keberlanjutannya. Seperti kegiatan pariwisata di Nepal yang dapat berkontribusi dalam penyediaan pekerjaan yang layak dan memicu pertumbuhan ekonomi (SDGs 8), berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (SDGs 1), serta meningkatkan akses kesehatan dan kesejahteraan (SDGs 3) (KC et al., 2021). Juga kegiatan agrowisata berbasis budidaya tanaman Anggrek di Desa Mulyosari telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat menuju desa mandiri melalui upaya pengembangan daya tarik obyek wisata, pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, pengembangan aksesibilitas dan pengembangan kelembagaan (Wahyudi & Yahya, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penelitian ini penting untuk dilakukan karena mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh agen pengelola wisata dan pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi dan kegiatan wisata yang ada di desa mereka untuk mewujudkan kemandirian desa dan aspek keberlanjutan dari kegiatan wisata tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui telah sampai pada tahap apa agensi tersebut dilakukan yang akan dilihat dari kacamata teori yang digunakan. Yang mana hal ini tidak menjadi fokus kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi suatu kejadian kasus berupa proses, program, *event*, individu, kelompok sosial atau institusi melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan kaya informasi dari suatu konteks yang diteliti (Wahyuningsih, 2013). Secara spesifik studi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses agensi yang dilakukan oleh para agen pengelola wisata dan pemerintah Desa Berjo dalam memanfaatkan potensi kegiatan wisata sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah desa yang mandiri dan berkelanjutan karena pendapatan yang dihasilkan dari sektor wisata per tahun dapat mencapai miliaran rupiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas sekretaris desa, staff BUMDes, ketua dan anggota BPD, serta masyarakat Desa Berjo yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* agar dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan penelitian (Mardalis, 2014). Pemilihan informan didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu seseorang yang mengetahui secara luas mengenai seluk beluk perkembangan dan berjalannya kegiatan wisata di Desa Berjo, seseorang yang secara aktif terlibat dalam menjalankan kegiatan wisata, dan masyarakat desa yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan kegiatan wisata tetapi sebagai pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya kegiatan wisata desa. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Desember 2022 sampai April 2023. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disertai dengan triangulasi sumber dari informasi masyarakat desa dan dokumen relevan dari kelurahan. Tahapan analisis data dilakukan dengan reduksi data; memilih dan merangkum hal-hal pokok hasil penelitian dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyajian data; pengelompokan data menurut pokok permasalahan sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan sementara dan dapat diketahui data yang kurang mendalam, dan penarikan kesimpulan; menyajikan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dari hasil penelitian yang telah dilakukan (Moleong, 2002; Sugiyono, 2016).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Berjo merupakan salah satu desa wisata yang cukup maju di Kecamatan Ngargoyoso. Desa Berjo mempunyai luas wilayah 1.623 Ha yang di dalamnya terdapat 10 dusun yang terbagi dalam 15 RW dan 50 RT. Dusun-dusun di Desa Berjo, yaitu Dusun Tambak, Dusun Berjo, Dusun Gandu, Dusun Gero, Dusun Moroto, Dusun Pabongan, Dusun Selorejo, Dusun Sுகു, Dusun Tagung dan Dusun Tlogo. Menurut data pemerintah Desa Berjo pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Berjo berjumlah 6.044 jiwa yang terdiri dari 3.032 jiwa penduduk laki-laki dan 3.012 jiwa penduduk perempuan. Secara geografis, Desa Berjo merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di ketinggian  $\pm$  1.500 mdpl yang membuat udara di Desa Berjo terasa sejuk dengan rata-rata suhu 22 °C – 32 °C. Di Desa Berjo terdapat beberapa objek wisata unggulan, yaitu objek wisata Air Terjun Jumog, Telaga Madirda, Candi Sுகു, Taman Hutan Rakyat, Tenggir Park dan Sendang Lawu, namun yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes Desa Berjo hanya objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Besarnya angka kunjungan wisatawan di objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda membuat BUMDes Desa Berjo menjadi BUMDes dengan pendapatan terbesar (terkaya) di Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu satu tahun, BUMDes Desa Berjo dapat memperoleh pendapatan sebesar 2 – 4 miliar rupiah, belum termasuk pendapatan dari karcis parkir dan sewa kios pedagang. Seperti pernyataan dari pak Winarno (staff keuangan BUMDes) berikut ini;

*“Pendapatan BUMDes dari wisata memang cukup besar. Ini cerita sedikit ya, pada tahun 2021 kemarin, BUMDes bisa memperoleh penghasilan 2 miliar lebih dan jumlah itu terus meningkat setiap tahun. Jumlah itu belum termasuk dari parkir dan uang sewa kios dari pedagang” (hasil wawancara).*

Sajian data di atas memperlihatkan bagaimana Desa Berjo mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkannya sebuah wisata pedesaan sebagai modal untuk mewujudkan sebuah desa mandiri dan berkelanjutan. Analisis data penelitian akan dilihat dari kacamata teori strukturasi Anthony Giddens dan teori *triple bottom line* John Elkington. Komponen teori strukturasi terdapat sebuah agen yang dipandang sebagai individu yang berpengetahuan dan mereka mengetahui tentang kondisi dan konsekuensi dari aktivitas yang mereka jalankan. Agen berdasarkan pengetahuannya akan bertindak untuk mereproduksi atau tidak mereproduksi suatu struktur atau sistem sosial tertentu, dan mereka memilih untuk mereproduksi praktik dengan cara mereka sendiri (Ferdoush, 2020). Salah satu rancangan utama teori strukturasi adalah aturan-aturan dan sumber daya. Aturan dalam konteks ini adalah semata-mata kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, sedangkan kebiasaan merupakan bagian dari rutinitas (Giddens, 2010). Sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh agen untuk mereproduksi sistem sosial dapat berupa ilmu pengetahuan, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan sebagainya.

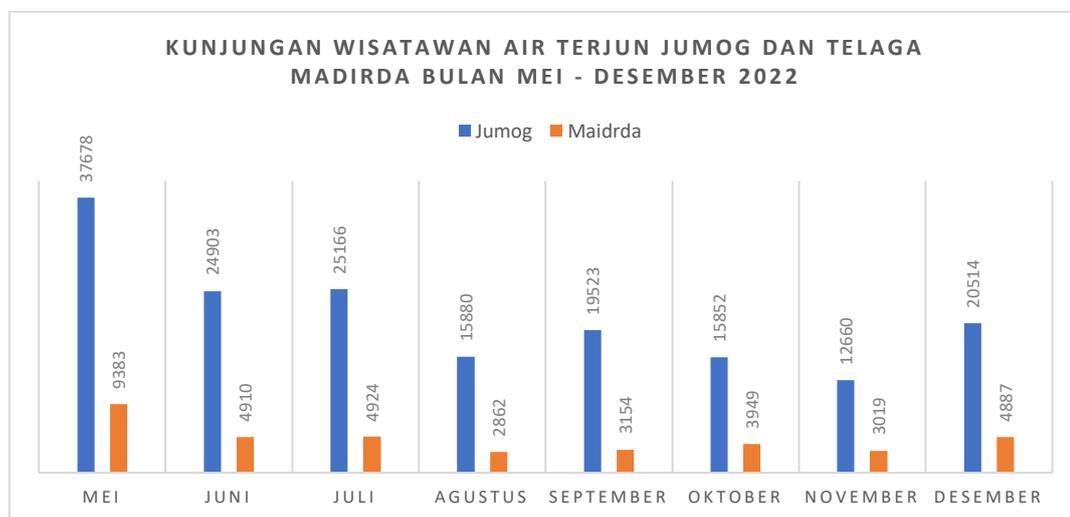
Agen seperti kepala desa dan pengelola desa wisata yang mempunyai kekuasaan dan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi aktor penggerak untuk mewujudkan desanya menjadi desa mandiri dan berkelanjutan, di mana proses tersebut dimulai dari tahapan signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Pada tahap signifikansi para aktor akan menilai apakah mereka perlu mereproduksi struktur/sistem sosial yang ada. Aktor akan berpikir perlunya mewujudkan desa wisata mereka menjadi desa mandiri dan berkelanjutan. Dari proses tersebut kemudian para aktor akan bertindak secara terstruktur dalam mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan, yang disebut sebagai proses dominasi yang akan menghasilkan tatanan moral melalui penyesuaian nilai, norma, dan standar masyarakat (Lamsal, 2012). Tindakan ini dilakukan untuk mengesahkan proses reproduksi sistem sosial yang dilakukan oleh aktor. Desa tersebut akan disahkan (dilegitimasi) sebagai desa mandiri dan berkelanjutan jika telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga dari hasil tindakan (signifikansi dan dominasi) yang telah dilakukan oleh aktor.

John Elkington melalui konsep *Triple Bottom Line* (TBL) berupaya untuk memberikan wawasan terkait pembangunan yang memperhatikan tiga hal utama, yaitu aspek sosial (*People*), keberlanjutan lingkungan (*Planet*), dan keuntungan ekonomi (*Profit*) jangka pendek maupun jangka panjang dengan melindungi modal alam dunia yang kritis dan terbarukan serta mengatasi ketidaksetaraan antar negara (Henriques & Richardson, 2004; Wilson, 2015). Dimensi sosial dari TBL berkaitan dengan aspek utama pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada bagaimana masyarakat akan terpengaruh dan bagaimana masyarakat dapat mendorong pembangunan tersebut. Dimensi lingkungan dari TBL terkait dengan pengelolaan sampah, pengurangan polusi, dan pengelolaan energi untuk keberlanjutan lingkungan. Dimensi ekonomi terkait dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan agar generasi berikutnya mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan, yang mungkin kedepannya dapat mengurangi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan permasalahan kemiskinan (Lerman, Benitez, Gerstlberger, Rodrigues, & Frank, 2021).

### Pengembangan Desa Wisata Berjo

Pengembangan Desa Berjo menjadi desa wisata dimulai pada tahun 2008. Sebelum itu pengembangan wisata diinisiasi oleh tokoh dari luar desa yang bernama pak Dulah. Pengembangan desa wisata dilakukan karena di wilayah desa terdapat potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata, yaitu air terjun dan telaga. Pada tahun 2008 pak Dulah menyerahkan pengembangan desa wisata kepada masyarakat Desa Berjo dan diprakarsai oleh kepala desa yang menjabat pada saat itu. Pada tahun ini pula BUMDes Desa Berjo terbentuk sebagai badan yang mengelola wisata di wilayah itu. Saat itu pemerintah Desa Berjo memberikan modal sebesar Rp10.000.000 dari APBDes kepada BUMDes untuk membangun fasilitas di objek wisata Air Terjun Jumog. Kemudian dari dua objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, BUMDes mulai mengelola kios untuk disewakan kepada pedagang, mengelola lahan parkir, mengelola jasa toilet/kamar mandi, serta jasa penyewaan *sound system* dan aula.

Selain objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, di Desa Berjo juga terdapat objek wisata lain, yaitu Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan Candi Suku. Namun hanya Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda yang dikelola secara mandiri oleh desa, Tahura dan Candi Suku dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan warisan budaya nasional. Sejak pembukaan wisata, perkembangan wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda menunjukkan progres yang sangat baik. Setiap bulan terdapat belasan hingga puluhan ribu wisatawan yang berkunjung ke Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda yang datang dari berbagai daerah.



**Gambar 3.** Jumlah Kunjungan Wisatawan Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda

Data pada Gambar 3 diambil dari data kunjungan wisatawan yang dikelola oleh BUMDes Berjo. Jumlah kunjungan wisatawan dari bulan Mei – Desember tahun 2022 di objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda tidak menunjukkan statistik yang selalu naik tetapi selalu stabil di atas 15 ribu wisatawan setiap bulannya. Objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda sendiri dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo. BUMDes Desa Berjo berdiri sejak tahun 2008 bertepatan pada masa awal pengembangan wisata di Desa Berjo. Sejak awal berdiri, BUMDes terus melakukan kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk terus melakukan pengembangan dan perbaikan fasilitas objek wisata agar jumlah pengunjung dapat terus meningkat. Sebelum masa pandemi, jumlah kunjungan wisatawan ke kedua objek wisata tersebut dapat mencapai 8.000 orang setiap akhir pekan.

Besarnya jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Berjo tentunya berdampak positif terhadap pendapatan desa. Dari besarnya pendapatan tiap tahun yang diperoleh membuat BUMDes Desa Berjo menjadi BUMDes terkaya di Kabupaten Karanganyar (Mashuri, 2021). Bahkan pada tahun 2020 saat masa pandemi dan sektor wisata sedang redup, BUMDes Desa Berjo memperoleh pendapatan sebesar 3,4 miliar. Dikatakan jika di luar masa pandemi pendapatan dapat mencapai 4,5 miliar hanya dari dua objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda. Pendapatan dari wisata tentunya tidak semuanya masuk ke dalam kas desa. Pendapatan dari sektor wisata akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 30 persen untuk dinas pariwisata, 30 persen masuk kas desa (PAD), dan 40 persen masuk kas BUMDes untuk perawatan dan perbaikan infrastruktur objek wisata serta gaji karyawan. Dari pendapatan yang diperoleh, setiap tahun BUMDes dapat menyumbang PAD puluhan hingga ratusan juta rupiah ke pemerintah Desa Berjo.



**Gambar 4.** Jumlah Pendapatan Desa Berjo dari Sektor Wisata

Gambar 4 disusun berdasarkan data pendapatan dan pembelanjaan Desa Berjo selama 5 tahun terakhir. Pendapatan desa dari sektor wisata menunjukkan progres yang positif. Dari tahun 2018 – 2020 menunjukkan statistik yang naik meskipun di tahun 2021 sempat menurun karena adanya pandemi Covid-19. Penurunan tersebut dirasa menjadi hal wajar karena pada tahun 2021 diberlakukan *lockdown* besar-besaran dari pemerintah sebagai respon melonjaknya kasus masyarakat yang terpapar Covid-19, yang membuat mobilitas masyarakat menjadi dibatasi. Ketika kasus Covid-19 sudah mulai melandai dan *lockdown* sudah dilonggarkan di tahun 2022, banyak masyarakat yang kembali berwisata untuk melepas kejenuhan yang berimplikasi pada meningkatnya kunjungan wisatawan dan pendapatan desa.

### Desa Berjo Menuju Desa Mandiri

Perkembangan wisata yang maju di Desa Berjo tidak lepas dari adanya kesadaran dan kerja keras dari tokoh-tokoh dan masyarakat Desa Berjo. Desa Berjo yang awalnya masih dipenuhi dengan semak-semak belukar karena lahan kering yang luas, kini mulai berubah menjadi desa yang cukup padat dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Desa Berjo mempunyai luas wilayah 1.623 Ha yang terbagi dalam 84,00 Ha sebagai lahan sawah, 191 Ha sebagai lahan kering, dan 1.256 Ha untuk lahan lain, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.044 jiwa yang terbagi menjadi 1.923 kepala keluarga dengan mayoritas mata pencaharian adalah sebagai petani (Tabel 1).

**Tabel 1.** Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Berjo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/pekebun	1.841
2.	Karyawan Swasta	1.551
3.	PNS	36
4.	Wiraswasta	84
5.	Perangkat Desa	12
6.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	11
Jumlah		3.535

Besarnya pendapatan desa dari sektor wisata serta adanya potensi lain mendorong pemerintah Desa Berjo untuk mewujudkan sebuah desa mandiri. Kriteria desa mandiri yang dirancang oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai beberapa indikator yang harus dipenuhi. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 (IDM 0.75) (BPS, 2018).

Pelayanan dasar dan umum sangat bergantung dengan adanya fasilitas yang memadai serta pelayanan yang baik dari unsur pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan dasar Desa Berjo terkait pendidikan dan kesehatan tergolong masih dalam level dasar. Ketersediaan fasilitas

pendidikan hanya terdapat sekolah dari level PAUD/TK – SD. Masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP harus bersekolah di luar desa yang jaraknya 5,7 – 11 km, sedangkan SMA/SMK jaraknya 4,5 – 10 km. Ketersediaan fasilitas kesehatan, Desa Berjo memiliki 9 posyandu, 1 poliklinik, 1 rumah bersalin, dan 1 puskesmas pembantu. Keadaan ini dapat dilihat sebagai fasilitas kesehatan yang cukup baik karena fasilitas-fasilitas tersebut cukup untuk menangani permasalahan kesehatan level rendah – menengah yang sering dialami oleh masyarakat desa. Masyarakat yang mengalami masalah kesehatan level serius yang akan berobat ke puskesmas atau rumah sakit umum daerah (RSUD) harus menempuh jarak sekitar 5,4 – 24 km dari desa. Bahkan jika akan ke rumah sakit yang terletak di kota jaraknya bisa sampai 26 – 36 km. Ketersediaan sarana prasarana akan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendapatan masyarakat. Terlebih di dalam desa wisata apabila sarana prasarana tersedia dengan baik, maka wisatawan yang datang akan lebih banyak dan masyarakat akan terdorong untuk melakukan penambahan fasilitas wisata baru seperti di Desa Wisata Gili Gede (Abdul, 2014; Anggreni, Suteja, & Indrapati, 2022).

Fasilitas penunjang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga di Desa Berjo juga cukup minim. Pasar yang identik sebagai pusat ekonomi desa juga tidak tersedia di Desa Berjo. Masyarakat yang akan berbelanja atau menjual hasil panen pertanian ke pasar harus keluar desa dan menempuh jarak sekitar 5,8 km yang lokasinya berada di Desa Kemuning. Ketersediaan fasilitas ibadah di Desa Berjo terbilang sangat mencukupi karena terdapat 27 masjid yang tersebar di wilayah desa. Dari 6.044 penduduk, hanya 4 orang yang beragama Katholik, 14 orang beragama Protestan dan yang lainnya beragama Islam (Tabel 2).

**Tabel 2.** Ketersediaan Fasilitas Desa Berjo

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Pendidikan	
	PAUD/TK	9
	SD	4
	SMP	0
	SMA/SMK	0
2.	Kesehatan	
	Posyandu	9
	Poliklinik	1
	Rumah bersalin	1
	Puskesmas	0
	Rumah sakit	0
3.	Ekonomi	
	Pasar	0
	Swalayan	0
	Lembaga keuangan non bank	1
4.	Ibadah	
	Masjid	27
	Gereja	0

Data pada Tabel 2 diambil dari data arsip ketersediaan sarana dan prasarana Desa Berjo. Ketersediaan fasilitas yang belum sepenuhnya mencukupi membuat Desa Berjo belum cukup layak untuk disebut sebagai desa mandiri karena dari segi ketersediaan akses fasilitas dasar masih pada tahap menengah, meskipun dalam aspek lain mempunyai skor yang cukup tinggi karena adanya kegiatan wisata di desa. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan pak Wahyu (sekretaris Desa Berjo) sebagai berikut;

*“Kita sebenarnya sudah menuju kearah situ (mewujudkan desa mandiri). Untuk Desa Berjo memang belum menjadi desa mandiri karena kita untuk akses kesehatan, seperti rumah sakit, ke sekolah SMA, ke pusat perbelanjaan atau ke kota jaraknya masih sangat jauh. Itu yang menjadi nilai kita rendah meskipun dalam aspek lain nilai kita tinggi karena didukung dari wisata desa ini. Tetapi kami terus berusaha untuk mewujudkan itu” (hasil wawancara).*

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa informan sebagai agen strukturasi telah sadar dan mengetahui akan potensi yang dimiliki oleh desanya. Tahapan signifikansi pada proses terbentuknya strukturasi telah terjadi karena agen telah berpikir untuk mewujudkan desanya menjadi sebuah desa mandiri. Bagi Giddens tahapan signifikansi akan dimulai dengan para aktor yang melakukan penilaian apakah mereka perlu mereproduksi struktur/sistem sosial yang ada. Secara keseluruhan Desa Berjo memang belum sepenuhnya siap dan mumpuni untuk dikategorikan sebagai desa mandiri. Juga masih ditemukan beberapa akses jalan desa yang berada dalam kondisi rusak. Terdapat 3 akses jalan

kabupaten/kota dan 1 jalan antar desa/kecamatan di Desa Berjo yang semuanya dalam kondisi rusak karena pemerintah kabupaten yang kurang tanggap untuk memperbaikinya. Namun secara keseluruhan, jalan milik desa telah berada dalam kondisi yang baik. Terdapat 15 jalan desa yang terbagi dalam 8 jalan aspal dan 7 jalan beton/semen yang semuanya dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan setiap tahun pemerintah Desa Berjo mengeluarkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk pembangunan/rehabilitasi jalan desa.

Sebagai contoh pada rancangan APBD Desa Berjo tahun 2023, total anggaran belanja desa mencapai 3,755 miliar rupiah, yang diantaranya 1,380 miliar untuk pembangunan/rehabilitasi jalan desa, 27,5 juta untuk pelatihan bidang kesehatan dan pencegahan stunting, 29 juta untuk penyelenggaraan posyandu, 595,5 juta untuk pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian, 80 juta untuk pembangunan/rehabilitasi saluran air bersih, dan 100 juta untuk pembangunan/peningkatan sarana prasarana wisata. Keadaan demikian dapat dilihat sebagai sebuah tahapan dominasi pada proses terbentuknya strukturisasi karena agen telah melakukan berbagai tindakan untuk kemajuan desanya. Tahapan dominasi dilakukan sebagai lanjutan dari tahapan signifikansi yang ditandai dengan adanya tindakan secara terstruktur oleh agen yang akan menghasilkan tatanan moral melalui penyesuaian nilai, norma dan standar masyarakat.

Desa Berjo masih belum layak untuk disebut sebagai desa mandiri juga didukung oleh data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih mengkategorikan Desa Berjo sebagai desa berkembang dengan nilai IDM 0.6986 (SIDesa, 2023). Kriteria untuk mencapai status desa mandiri semakin sulit dicapai karena terdapat sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dengan kurang baik sebab pengelolaan BUMDes kurang transparan dan akuntabel. Telah terjadi penyelewengan dana pendapatan wisata yang dilakukan oleh kepala desa (komisaris) dan manajer BUMDes yang merugikan keuangan negara mencapai 1,16 miliar rupiah. Kejadian ini membuat kepala desa dan manajer BUMDes tersebut ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar dan telah resmi ditahan karena sudah didakwa dan dituntut hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang (Salafudin, 2023).

Pengelolaan BUMDes yang kurang transparan dan akuntabel diduga telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Masyarakat dari unsur RT dan RW mengeluhkan dana pendapatan wisata yang masuk ke PAD desa dengan jumlah yang terlalu sedikit, mengingat pendapatan yang diperoleh BUMDes selama setahun dapat mencapai miliaran rupiah. Keadaan ini membuat 90 persen (65 dari 75 orang) RT dan RW di Desa Berjo melakukan musyawarah desa (Musdes) bersama pemerintah desa dan BPD pada tanggal 24 Februari 2023 untuk membahas dan menyepakati pembubaran staff BUMDes dan pengawas BUMDes. BUMDes dinilai melanggar karena telah secara sepihak menunjuk staff dan badan pengawas tanpa meminta persetujuan dari pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam Musdes tersebut semua peserta musyawarah juga menuntut karyawan BUMDes untuk memberikan LPJ kepada pemerintah desa sebagai pertanggung jawaban. Terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan manajer BUMDes telah sangat merugikan masyarakat. Mereka menganggap bahwa BUMDes merupakan aset kebanggaan Desa Berjo yang harus dikelola dengan baik dan memberi manfaat bagi semua masyarakat Desa Berjo karena aset yang dihasilkan pertahun dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kejadian ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes menjadi menurun, padahal jika kepercayaan dapat terbentuk dengan baik akan memunculkan hubungan atau jaringan yang erat antara BUMDes dan masyarakat. Seperti kepercayaan yang diperoleh BUMDes Sumber Sejahtera dari masyarakat karena adanya bukti pencatatan yang baik seperti hasil penjualan tiket dan sebagainya. Selain itu, kepercayaan juga dibangun melalui tindakan pengontrolan yang terstruktur dalam berbagai teknis kegiatan yang dilakukan (Pertiwi, Pratiwi, & Meitasari, 2023).

Meskipun masih tergolong desa berkembang dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik, dalam aspek pelayanan umum bagi masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi terkait data kependudukan dan sejenisnya selalu dilayani dengan cepat oleh pegawai pemerintah desa. Setiap hari kerja mulai dari pagi hari hingga menjelang sore hari selalu ada pegawai di kantor yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Masyarakat selalu terbantu dan dipermudah ketika membutuhkan bantuan karena pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan responsif. Para pegawai juga cukup terbuka dan tidak ragu-ragu dalam memberikan pelayanan meskipun kepada penduduk dari luar Desa Berjo. Seperti yang disampaikan oleh informan yang bernama bu Tukinem berikut.

*"kalau untuk pelayanan di kelurahan itu sudah sangat baik. Setiap kita butuh untuk mengurus dokumen apa gitu pegawainya langsung cepat ngurusnya dan jadinya juga cepat... untuk pelayanan itu biasanya di hari Senin sampai Jumat, sekitar jam 7.30 sampai jam 2-an siang" (hasil wawancara).*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bagaimana Desa Berjo telah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan cukup baik. Hal ini menjadi poin positif bagi desa karena salah satu kriteria

menuju desa mandiri adalah penyediaan layanan umum yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman dari peneliti, para pegawai desa selalu bersikap ramah dan cekatan dalam membantu peneliti untuk mencari dokumen pendukung data penelitian. Tidak hanya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya sendiri, tetapi juga kepada masyarakat dari luar desa. Jika masyarakat mendapatkan pelayanan yang kurang responsif dan berbelit-belit, akan memperoleh penilaian yang negatif dari masyarakat seperti yang terjadi di Desa Kaliwining (Pamungkas & Jakfar, 2022).

### **Keberlanjutan Desa Wisata Berjo: Sosial, Lingkungan dan Ekonomi**

Keberlanjutan memungkinkan adanya kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang di samping tetap melakukan pemenuhan kebutuhan pada masa sekarang (Henriques & Richardson, 2004). Desa Berjo sebagai sebuah desa wisata telah memperhatikan beberapa aspek keberlanjutan dari awal peluncuran wisata agar pengelolaan wisata yang dijalankan dapat bertahan lama dan terus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Beberapa elemen masyarakat mulai dari pemuda, petani, pedagang, tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya terus dilibatkan untuk menjaga dan mengelola wisata. Tujuan dari tindakan ini adalah agar wisata desa dapat terus lestari dan berkembang semakin maju. Hampir 100 persen pengelola, karyawan dan pedagang yang ada di objek wisata Desa Berjo merupakan masyarakat setempat. Masyarakat yang ber-KTP di luar Desa Berjo tidak diperbolehkan untuk menjadi karyawan maupun pedagang di objek wisata.

### **Keberlanjutan aspek sosial**

Keberlanjutan aspek sosial menyangkut bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan wisata dan ikut mendorong dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan wisata di Desa Berjo dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Pada masa awal pembukaan wisata, masyarakat bergotong-royong secara mandiri yang dimulai dengan membersihkan lingkungan sekitar objek wisata, karena dulu masih dipenuhi dengan semak belukar. Masyarakat sangat mendukung adanya wisata di desa karena terdapat kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata.

Pesatnya perkembangan wisata di Desa Berjo tak luput dari adanya dukungan dan kerjasama antar masyarakat desa. Masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam pengembangan wisata karena manfaat dari adanya wisata sudah terlihat jelas. Desa mulai didatangi oleh banyak wisatawan, masyarakat mulai terserap menjadi karyawan maupun pedagang, bahkan harga tanah di sekitar lokasi wisata juga ikut naik. Terdapat sekitar 60 karyawan mulai dari manajer hingga tukang parkir yang bekerja di objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda yang semuanya merupakan warga Desa Berjo. Jumlah tersebut belum termasuk pedagang dan tukang ojek antar jemput di Air Terjun Jumog yang jika ditotal dengan karyawan berjumlah hampir 200 orang. Masyarakat yang ber-KTP di luar Desa Berjo dilarang untuk menjadi karyawan, pedagang maupun tukang ojek yang bertujuan agar adanya wisata di desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan masyarakat juga dapat ikut andil dalam pengelolaan wisata. Hal ini selaras dengan pernyataan dari pak Winarno (staff keuangan BUMDes) dan pak Iswanto (staff perencanaan dan pengembangan BUMDes) yang juga merupakan informan dalam penelitian ini;

*"Jadi memang semua karyawan, tukang parkir, pedagang dan tukang ojek di wisata Desa Berjo semuanya adalah masyarakat yang ber-KTP Desa Berjo. Orang yang tidak ber-KTP Desa Berjo memang kami larang dengan tujuan agar masyarakat Desa Berjo itu juga memperoleh manfaat dari adanya wisata ini.... Masyarakat juga bisa andil dalam pengelolaan wisata karena isinya masyarakat Desa Berjo sendiri" (hasil wawancara).*

Keikutsertaan masyarakat yang lain adalah sebagian petani dilibatkan dengan menanam komoditas buah-buahan seperti jambu dan pisang yang hasil panennya dijual di lokasi wisata, khususnya di Air Terjun Jumog. Petani juga menjadi lebih untung karena hasil panen yang dijual di lokasi wisata dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Ada banyak lapak pedagang mulai dari penjual makanan anak-anak, buah-buahan, *merchandise*, hingga makanan berat yang berjualan di dalam area wisata air terjun. Keterlibatan petani sekaligus dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat desa untuk lebih berkembang melalui penjualan hasil panen. UKM sangat penting di negara berkembang sebagai sarana untuk mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi. Kewirausahaan mikro dalam pariwisata dapat dijadikan media untuk mempromosikan pertumbuhan sosial-ekonomi dan tujuan konservasi dalam pariwisata berbasis alam (KC et al., 2021).

Berkat berkembangnya wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda yang banyak mendatangkan wisatawan, masyarakat Desa Berjo juga mulai mengembangkan bisnis wisata baru dengan membuka restoran, penginapan, dan atraksi Jeep yang dikelola secara mandiri. Atraksi Jeep merupakan kegiatan yang mengajak wisatawan untuk keliling Desa Berjo dengan menaiki mobil Jeep. Setiap mobil dapat dinaiki sebanyak 4-5 orang termasuk sopir dengan tarif sekali jalan antara 450.000 – 600.000 tergantung

panjangnya rute yang dipilih. Ini menjadi hal yang positif karena dapat menambah atraksi wisata yang ditawarkan di Desa Berjo. Selain dapat memberi manfaat bagi pemilik mobil, atraksi Jeep juga memberikan manfaat bagi anak-anak Desa Berjo. Setiap seminggu sekali terdapat giliran untuk setiap masjid di Desa Berjo bagi anak-anak TPA untuk diajak keliling desa dengan menaiki mobil Jeep tersebut. Secara tidak langsung hal ini juga dapat menjadi pengenalan kepada anak-anak tentang wisata yang ada di desanya. Seperti yang disampaikan oleh pak Hartomo (ketua BPD Berjo) berikut;

*"baru-baru ini di Desa Berjo juga ada penyewaan mobil Jeep. Ini dikelola secara pribadi oleh warga jadi hasilnya tidak masuk kas desa. Nantinya wisatawan itu diajak untuk keliling desa dengan mobil itu. Biasanya tarifnya itu antara 450 ribu sampai 600 ribu tergantung rutenya... setiap seminggu sekali diadakan giliran untuk semua masjid di Desa Berjo untuk mengajak anak-anak TPA keliling desa agar anak-anak itu bisa senang dan ikut merasakan manfaat dari wisata yang ada di desa ini" (hasil wawancara).*

Berdasarkan pernyataan informan di atas manfaat dari adanya kegiatan wisata di Desa Berjo tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang ikut andil di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wisata desa. Masyarakat yang masih anak-anak juga bisa ikut merasakannya. Meskipun anak-anak belum terdorong untuk ikut serta dalam pengelolaan wisata, dengan adanya kegiatan tersebut akan memunculkan kesadaran bagi anak-anak bahwa di desanya terdapat wisata yang dapat memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kesadaran ini yang nantinya bisa menjadi modal untuk pengelolaan wisata berkelanjutan yang akan dijalankan oleh generasi mendatang. Sebab pengelolaan wisata berkelanjutan pada masa yang akan datang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni karena tantangan kedepan akan semakin kompleks.

Anak-anak muda harus melek teknologi dan informasi serta menyadari bahwa peranan mereka akan sangat dibutuhkan di masa depan. Seperti pemuda di Gunungkidul yang terdorong untuk menjadi petani milenial yang memanfaatkan informasi dan teknologi untuk mengembangkan sebuah agrowisata. Peran petani milenial sangat membantu masyarakat petani sekitar terutama dalam mengatasi persoalan harga di tingkat petani dan juga membantu dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian. Keberadaan teknologi dan informasi menjadi sangat penting karena sebagai sumber pengetahuan, sarana untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan budidaya pertanian maupun pemasaran hasil pertanian. Implikasi peran petani milenial tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Septeri, 2023).

Keberlanjutan aspek sosial untuk masa yang akan datang juga dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan biaya kuliah kepada siswa berprestasi dari Desa Berjo yang kondisi ekonominya kurang mampu. Meskipun program ini belum dapat berjalan, tetapi program ini telah direncanakan oleh BUMDes Desa Berjo yang tujuannya agar nantinya siswa tersebut setelah menimba ilmu di bangku kuliah dapat berkontribusi dalam pembangunan desa, seperti yang diutarakan pak Winarno selaku Staff Keuangan BUMDes berikut;

*"Sebenarnya BUMDes juga sudah merencanakan untuk membuat program beasiswa bagi siswa kurang mampu dari Desa Berjo yang ingin kuliah, tetapi program ini belum bisa berjalan karena kebetulan orang-orang yang kuliah di sini kondisi ekonominya sudah mampu semua sehingga tidak membutuhkan bantuan ini" (hasil wawancara).*

### **Keberlanjutan aspek lingkungan**

Dimensi lingkungan dari TBL terkait dengan pengelolaan sampah, pengurangan polusi dan pengelolaan energi yang dalam penerapan dan pemanfaatannya juga harus memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul. Objek wisata Desa Berjo yang sebagian besar merupakan wisata alam perlu adanya pemeliharaan dan perawatan agar wisata dan lingkungan di sekitarnya tidak rusak. Lingkungan yang terjaga akan menambah nilai estetika dan daya tarik bagi wisatawan. Wisata di Air Terjun Jumog maupun Telaga Madirda menampilkan lingkungan asri dan bersih berkat pengelolaan yang baik. Lingkungan dibersihkan secara rutin dan banyak disediakan tempat sampah sehingga pengunjung tidak kesulitan untuk membuang sampah sesuai tempatnya. Namun beberapa wisatawan dan pedagang di objek wisata Air Terjun Jumog sedikit mengeluh terkait belum adanya fasilitas untuk berteduh ketika hujan turun. Banyak wisatawan yang kesulitan untuk mencari tempat berteduh selain di warung-warung dan mushola.

Selama pembukaan wisata yang sudah berjalan selama bertahun-tahun belum pernah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya kegiatan wisata tersebut. Penjagaan lingkungan dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar lingkungan objek wisata agar tetap asri dan tidak timbul kerusakan lingkungan. Penghijauan dilakukan dengan bekerjasama dengan unsur masyarakat dan dinas terkait. Masyarakat diikutsertakan sebagai tenaga pelaksana dan dinas sebagai pihak penyedia bibit tanaman. Secara berkala petugas pengelola juga melakukan observasi lingkungan untuk mengetahui

kondisi lingkungan. Apabila ditemukan kondisi lingkungan di dalam wisata yang kurang baik maka petugas akan melakukan perbaikan. Pengelola wisata Desa Berjo sangat memperhatikan kondisi lingkungan agar objek wisata tidak rusak dan dapat terus berjalan karena manfaat yang didapat oleh masyarakat dari wisata cukup besar. Seperti hasil wawancara dengan informan pak Iswanto berikut;

*“untuk pemeliharaan wisata ini, saya sebagai Staff Perencanaan dan Pengembangan di BUMDes itu secara berkala melakukan peninjauan lokasi wisata untuk mengecek apakah ada fasilitas atau lingkungan yang rusak. Jika ada itu saya dan tim langsung memperbaikinya.... Untuk program penghijauan memang ada namun tidak dilakukan secara rutin atau hanya dalam masa-masa tertentu. Di sini kami bekerja sama dengan masyarakat yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat dan pemuda juga Dinas Lingkungan untuk meminta bantuan bibit tanaman untuk program penghijauan. Karena terkadang ada hutan yang gundul terutama di dekat Telaga Madirda itu kita tanami agar tidak terjadi kerusakan lingkungan” (hasil wawancara).*

Selain pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, informan pak Iswanto menuturkan bahwa BUMDes juga mulai memanfaatkan energi dari alam yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari aspek keberlanjutan lingkungan. Saat ini BUMDes Desa Berjo juga menjalankan program penjualan air mineral kemasan yang memanfaatkan air dari Telaga Madirda. Penjualan air mineral saat ini baru dijual di restoran sekitar desa dan nantinya untuk program jangka panjangnya akan dijual dalam jangkauan yang lebih luas. Hal ini merupakan hal positif karena ketersediaan air bersih di Desa Berjo sangat melimpah dan termasuk sumber daya alam yang ramah lingkungan dan tak terbatas, yang dampak kedepannya dapat memberikan penghasilan tambahan bagi BUMDes. Sebab kemajuan ekonomi tanpa adanya pemeliharaan lingkungan hanya akan menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang. Kemajuan sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan di Uni Eropa telah diukur selama periode 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang mengecewakan. Sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah menunjukkan kemajuan sosial-ekonomi tetapi diikuti terjadinya degradasi lingkungan. Negara Uni Eropa semakin berhasil memenuhi kebutuhan generasi saat ini, namun hal ini mengakibatkan pengikisan modal alam yang dibutuhkan oleh generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Hametner, 2022).

### **Keberlanjutan aspek ekonomi**

Aspek ekonomi memungkinkan generasi berikutnya akan mendapat manfaat dari pembangunan yang dilakukan, yang mungkin kedepannya akan dapat mengurangi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan permasalahan kemiskinan. Pembangunan wisata di Desa Berjo yang dalam pengelolaannya hanya melibatkan masyarakat desa sendiri secara perlahan mulai dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Terdapat sekitar 200 orang yang terserap menjadi karyawan objek wisata, pedagang maupun tukang ojek antar jemput di Air Terjun Jumog. Hal ini karena adanya peraturan di mana masyarakat yang ber-KTP di luar Desa Berjo dilarang untuk menjadi karyawan, pedagang maupun tukang ojek yang bertujuan agar adanya wisata di desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yang salah satu manfaatnya yaitu dapat menangkat perekonomian masyarakat.

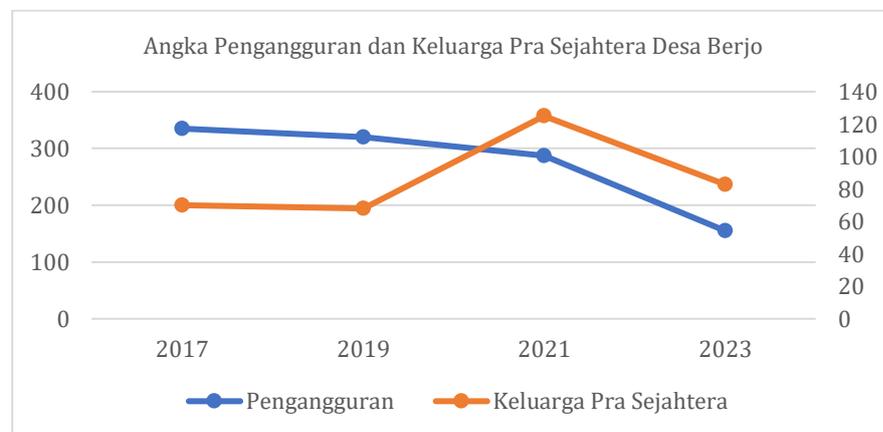
Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan wisata memperoleh gaji setiap bulan yang diambil dari pendapatan wisata. Gaji karyawan berkisar antara 1,5 juta sampai 4,5 juta tergantung dari unit kerja yang mereka jalankan. Banyak pedagang yang dulunya berprofesi sebagai petani setelah adanya wisata menjadi beralih profesi menjadi pedagang. Saat menjadi petani pendapatan yang diperoleh sangat pas-pasan namun setelah menjadi pedagang pendapatan yang diperoleh cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa untuk membiayai sekolah anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Tukinem (pedagang di objek wisata Air Terjun Jumog), informan menyatakan;

*“dulunya saya itu petani mas, setelah ada wisata ini saya pindah jadi pedagang. Dulu pendapatan dari petani sangat pas-pasan bahkan kadang tidak cukup, tapi Alhamdulillah sekarang pendapatan dari berdagang ini bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak saya” (hasil wawancara).*

Angka pengangguran menurun dan angka kesejahteraan masyarakat desa Berjo juga dapat meningkat semenjak wisata desa berkembang cukup pesat, meskipun pada tahun 2021 angka keluarga pra sejahtera naik signifikan karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga sebagai hasil dari adanya kebijakan yang melarang masyarakat luar desa untuk bekerja dan menjadi karyawan di objek wisata, yang membuat banyak masyarakat desa terserap menjadi karyawan maupun pedagang yang berimplikasi pada meningkatnya perekonomian keluarga dari masyarakat tersebut. Pemuda desa yang dulunya menganggur kini dapat bekerja dan mempunyai penghasilan dengan menjadi tukang parkir maupun tukang ojek di objek wisata Air Terjun Jumog. Jarak antara tempat parkir kendaraan dan loket masuk wisata yang cukup jauh membuat jasa ojek ini cukup diminati oleh wisatawan. Terdapat sekitar 30 tukang ojek yang setiap pekan dapat memperoleh penghasilan rata-rata sekitar 250.000 rupiah. Kegiatan ekowisata di Pulau Tioman, Malaysia pun juga demikian, sebab adanya kegiatan wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan

ekonomi masyarakat sekitar dan membuka kesempatan kerja di pulau tersebut (Imm, Wei, Ann, & Ramachandran, 2017).

Hal lain yang dilakukan oleh agen pengelola wisata Desa Berjo untuk menunjang tercapainya keberlanjutan aspek ekonomi saat ini dan masa mendatang adalah dengan mengembangkan wisata perkebunan jambu. Wisata ini dilakukan dengan memberdayakan petani di Desa Berjo yang mempunyai lahan untuk ditanami pohon jambu yang nantinya ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Desa Berjo dan ingin berwisata di kebun jambu dapat memetik ataupun memakan langsung dari pohonnya dan membayar sesuai jumlah buah yang dipetik atau dimakan. Jenis buah jambu yang dikembangkan untuk wisata tersebut adalah Jambu Kristal. Hal ini cukup menarik karena wisatawan dapat merasakan atraksi wisata baru di Desa Berjo sekaligus dapat memberikan penghasilan tambahan bagi para petani. Selain menunjang keberhasilan aspek ekonomi, kegiatan tersebut juga dapat menunjang keberlanjutan aspek lingkungan karena dalam praktiknya juga akan memanfaatkan dan menjaga kesuburan lahan yang tersedia di desa. Implikasi kedepannya, taraf ekonomi masyarakat dapat terus meningkat serta lebih banyak tenaga kerja yang dapat terserap di dalam kegiatan pariwisata desa. Jangan sampai kegiatan wisata di desa dikelola secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat setempat yang akhirnya memunculkan protes dari masyarakat dan masyarakat hanya memperoleh sedikit manfaat dari kegiatan wisata tersebut, seperti yang terjadi di Desa Hawraman, Iran (Ghaderi & Henderson, 2012).



Gambar 5. Jumlah Pengangguran dan Keluarga Pra Sejahtera Desa Berjo

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Wisata Desa Berjo menunjukkan perkembangan yang signifikan dan bisa menjadi salah satu desa wisata yang maju di Kabupaten Karanganyar dengan pendapatan per tahun dapat mencapai miliaran rupiah serta jumlah rata-rata kunjungan wisatawan perbulan dapat mencapai 25 ribu wisatawan. Agen pengelola wisata dan pemerintah desa telah sadar dan mengetahui akan potensi yang dimiliki desa mereka sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah desa mandiri tetapi upaya yang dilakukan masih belum berhasil. Pada tahapan proses strukturasi, agen-agen di Desa Berjo masih dalam tahapan signifikansi dan dominasi. Para agen telah berpikir untuk mewujudkan sebuah desa mandiri berkat adanya wisata yang maju di desa sebagai tahapan signifikansi. Proses dominasi dilakukan oleh agen dengan membelanjakan uang pendapatan desa untuk memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat. Tahapan legitimasi belum tercapai karena Desa Berjo pada saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dengan nilai IDM 0,6986. Keadaan ini juga diperkuat karena penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik sebab adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan manajer BUMDes, serta ketersediaan sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar masyarakat juga masih belum sepenuhnya mencukupi. Keadaan semakin ironis karena di desa wisata yang pendapatannya bisa mencapai miliaran rupiah masih juga ditemukan akses jalan yang rusak karena pemerintah yang kurang tanggap untuk memperbaikinya. Terlepas dari berbagai permasalahan dan ketersediaan fasilitas desa yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki, keberlanjutan desa wisata berjo yang digerakkan oleh agen wisata dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Dalam aspek sosial, masyarakat desa telah terdorong dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata yang hasilnya dapat menunjang tercapainya keberlanjutan aspek ekonomi dengan meningkatnya perekonomian masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Keberlanjutan aspek lingkungan juga telah dijalankan dengan melakukan penghijauan dan pemeliharaan lingkungan wisata serta manajemen

pengelolaan sampah wisata yang baik. Temuan terkait pengembangan desa wisata mandiri dan berkelanjutan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak terkait maupun peneliti lain untuk melakukan kajian terkait pengembangan strategi untuk mewujudkan desa wisata mandiri dan berkelanjutan melalui metode yang lebih komprehensif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, I. (2014). Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(3), 179–182. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i3.1554>
- Anggreni, M. A., Suteja, I. W., & Indrapati, I. (2022). Dampak Perkembangan Pariwisata Pada Lingkungan Fisik (Sarana Prasarana) dan Pengaruhnya Terhadap Sempadan Pantai di Desa Wisata Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Journal Of Responsible Tourism*, 1(3), 301–312. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i3.1373>
- Ayuningsih, F., Pridia, H., & Teviningrum, S. (2019). *Pengembangan Wisata Perdesaan & Wisata Perkotaan: Rancangan Pola Perjalanan Gelang Projo (Magelang, Kulon Progo, Purworejo), Belitung Timur, Malang Raya* (1st ed.; N. W. G. Adnyani, ed.). Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Birendra, K. C., Dhungana, A., & Dangi, T. B. (2021). Tourism and the sustainable development goals: Stakeholders' perspectives from Nepal. *Tourism Management Perspectives*, 38(April), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100822>
- BMZ. (2022). Tourism. Retrieved December 10, 2022, from Federal Ministry for Economic Cooperation and Development website: <https://www.bmz.de/en/issues/tourism>
- BPS. (2018). Jumlah Desa Mandiri (Desa). Retrieved August 10, 2022, from bps.go.id website: [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1234/sdgs\\_10/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1234/sdgs_10/1)
- Degarege, G. A., & Lovelock, B. (2021). Addressing zero-hunger through tourism? Food security outcomes from two tourism destinations in rural Ethiopia. *Tourism Management Perspectives*, 39(June), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100842>
- Ferdoush, M. A. (2020). Structuration Theory. In *International Encyclopedia of Human Geography* (2nd ed., Vol. 13, pp. 97–104). <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-102295-5.10714-0>
- Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). Sustainable rural tourism in Iran: A perspective from Hawraman Village. *Tourism Management Perspectives*, 2(3), 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.03.001>
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat* (1st ed.; S. Z. Qudsy, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hametner, M. (2022). Economics without ecology: How the SDGs fail to align socioeconomic development with environmental sustainability. *Ecological Economics*, 199(June), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107490>
- Henriques, A., & Richardson, J. (2004). *The Triple Bottom Line: Does it All Add Up?* (1st ed.; A. Henriques & J. Richardson, Eds.). Sterling, VA: Earthscan.
- Imm, S., Wei, K., Ann, J., & Ramachandran, S. (2017). Seeking tourism sustainability: A case study of Tioman Island, Malaysia. *Tourism Management*, 58(October), 101–107. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.10.007>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (1st ed.; S. Hidayat, Ed.). Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jatengprov, D. (2018). Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka 2028. Retrieved June 14, 2023, from [disporapar.jatengprov website: https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661735747Buku-Statistik-Pariwisata-2018-\(Final\).pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1661735747Buku-Statistik-Pariwisata-2018-(Final).pdf)
- Kastenholz, E., Eusébio, C., & Carneiro, M. J. (2018). Segmenting the rural tourist market by sustainable travel behaviour: Insights from village visitors in Portugal. *Journal of Destination Marketing and Management*, 10(November 2017), 132–142. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.09.001>
- Lamsal, M. (2012). The Structuration Approach of Anthony Giddens. *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology*, 5(1), 111–122. <https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i1.7043>
- Lerman, L. V., Benitez, G. B., Gerstlberger, W., Rodrigues, V. P., & Frank, A. G. (2021). Sustainable conditions for the development of renewable energy systems: A triple bottom line perspective. *Sustainable Cities and Society*, 75(June), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103362>
- Ludiyanto, A. (2022). Ada Berapa Sih Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar? Ini Daftarnya. Retrieved December 12, 2022, from Solopos website: <https://www.solopos.com/ada-berapa-sih-desa-wisata-di-kabupaten-karanganyar-ini-daftarnya-1338614>
- Luthfi, W. (2021). Jumlah Desa Wisata Kian Meningkatkan dan Bentuk Sinergi Banyak Pihak Kelola Potensi Desa. Retrieved August 11, 2022, from [goodnewsfromindonesia.id website: https://www.goodnewsfromindonesia.id](https://www.goodnewsfromindonesia.id)

- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/09/07/jumlah-desa-wisata-kian-meningkat-bentuk-sinergi-banyak-pihak-kelola-potensi-desa>
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mashuri, D. (2021). Desa Berjo Ngargoyoso Satu Satunya Desa Milyarder Terkaya di Kabupaten Karanganyar. Retrieved March 3, 2023, from detikcyber.com website: <https://detikcyber.com/index.php/2021/04/06/desa-berjo-ngargoyoso-satu-satunya-desa-milyarder-terkaya-di-kabupaten-karanganyar/>
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.; T. Surjaman, Ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>
- Pasanchay, K., & Schott, C. (2021). Community-based tourism homestays' capacity to advance the Sustainable Development Goals: A holistic sustainable livelihood perspective. *Tourism Management Perspectives*, 37(November), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100784>
- Pertiwi, A., Pratiwi, D. E., & Meitasari, D. (2023). Generasi Muda Desa: Pengambilan Keputusan Bekerja dan Kepercayaan pada BUMDES. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.43574>
- Prastiwi, D. A., Cahyaningtyas, A., Triana, D., Suchaini, U., Nurcahyo, E. H., Helaw, T. K., ... Astutiningsih, S. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018* (1st ed.; Masfufah, T. Suryaningsih, & A. Naim, Eds.). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Risanti, S. (2023). Jumlah Desa Wisata di Indonesia 2023, Terbaru! Retrieved June 14, 2023, from Fortune Indonesia website: <https://www.fortuneidn.com/news/surti/jumlah-desa-wisata-di-indonesia>
- Sadya, S. (2022). Makin Banyak Desa Maju dan Mandiri di Indonesia. Retrieved June 14, 2023, from DataIndonesia.id website: <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/makin-banyak-desa-maju-dan-mandiri-di-indonesia>
- Salafudin, I. (2023). Dugaan Korupsi Bumdes Senilai Rp1,16 Miliar, Kades Berjo Dituntut 7,5 Tahun Penjara. Retrieved April 10, 2023, from suaramerdeka-solo.com website: <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/057798720/dugaan-korupsi-bumdes-senilai-rp116-miliar-kades-berjo-dituntut-75-tahun-penjara>
- Septeri, D. I. (2023). Lahirnya Petani Milenial dan Peranannya dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 29–39. Retrieved from <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.50608>
- SIDesa. (2023). Indeks Membangun Desa. Retrieved April 10, 2023, from SIDesa Jawa Tengah website: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.13.07.2002>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suhamdani. (2021). Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar Sukses Sebagai Desa Kaya Dengan PAD Tembus Rp 8 Miliar Per Tahun. Retrieved August 11, 2022, from joglosemarnews.com website: <https://joglosemarnews.com/2021/12/desa-berjo-ngargoyoso-karanganyar-sukses-sebagai-desa-kaya-dengan-pad-tembus-rp-8-miliar-per-tahun/>
- UNDP. (2022). Sustainable Development Goals. Retrieved August 25, 2022, from United Nations Development Programme website: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- UNWTO. (2019). Tourism and Sustainable Development Goals. Retrieved December 10, 2022, from Tourism For SDGs website: <https://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/tourism-and-sdgs/>
- Wahyudi, A., & Yahya, K. (2021). Pengembangan Agrowisata Desa Mulyosari di Tengah Kehidupan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 281–293. <https://doi.org/10.36563/p.v14i02.359>
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus* (1st ed.; Wahyuningsih, Ed.). Madura: UTM Press.
- Wilson, J. P. (2015). The triple bottom line: undertaking an economic, social, and environmental retail sustainability strategy. *International Journal of Retail and Distribution Management*, 43(4), 1–18. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-11-2013-0210>